



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI JUMAT, 17 APRIL 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo menghadirkan narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim untuk mengajari mendapatkan NPP.

Pengelola Perpustakaan Sekolah di Sidoarjo Diajari Daftar NPP

Sidoarjo, Bhirawa
Pengelola perpustakaan sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo dilatih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim untuk bisa mendaftarkan Nomor pokok Perpustakaan (NPP) kepada Perpustakaan Nasional. Pustakawan ahli madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov Jatim, Sri Purwati, mengatakan dengan mendapatkan NPP, Perpustakaan Nasional akan bisa mendaftarkan perpustakaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo bahkan Perpustakaan se Indonesia.

"Kalau perpustakaan tidak punya NPP, ibaratnya seperti hutan rimba, Perpustakaan Nasional tidak bisa mendeteksi keberadaan perpustakaan sekolah yang ada," komentar Sri Purwati, Kamis (16/4) kemarin, di ruang delta karya, Setda Sidoarjo, yang memberikan sosialisasi kepada para petugas perpustakaan sekolah di Kabupaten Sidoarjo, dalam Rakor yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.

Kalau ada NPP, Perpustakaan Nasional akan bisa tahu di sekolah itu sudah ada layanan perpustakaan atau belum. Sesuai undang-undang, sebetulnya keberadaan perpustakaan sekolah itu wajib. Karena keberadaan perpustakaan sekolah bisa mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Namun terkadang ditunda. Sekolah mengutamakan kebutuhan yang lain. [kus.wwn]

HIPMI Sidoarjo Dorong Kolaborasi dengan Pemerintah

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menghadiri halabihal yang diselenggarakan DPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Rabu 15 April 2026 di Fave Hotel Sidoarjo.

Dalam acara ini, Wakil Bupati Sidoarjo menyampaikan, tema Reconnect and Grow: From Silaturahmi to Sinergi sangat relevan. Tema ini merefleksikan harapan bahwa interaksi awal yang terjalin dapat berkembang menjadi kolaborasi strategis yang signifikan, dengan tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi yang kuat.

"Kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, tetapi juga merupakan wadah diskusi informal yang berpotensi menciptakan peluang usaha. Dengan saling mengenal, kita dapat membangun koneksi yang bermanfaat untuk pengembangan usaha kita," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa HIPMI memiliki energi yang besar karena diisi oleh generasi muda yang inovatif dan penuh semangat. Peran ini sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini tentunya dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.

"Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Melalui kolaborasi, mari kita berupaya menekan angka pengangguran tersebut," ajaknya.

Ketua DPC HIPMI Sidoarjo, Zakaria Dimas Pratama, menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga diharapkan dapat menciptakan sinergi dan kolaborasi guna membangun perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. (md/rus)



Halalbihalal HIPMI Sidoarjo.



REWARDS: Dua seter bus eksklusif Terminal Purabaya bakal dipergunakan hingga 40 meter.

Terminal Purabaya Tata Dua Selter Bus Premium

Setelah Pengguna Meringkat
Sidoarjo – Jumlah pengguna bus premium seperti double decker dan sleeper semakin meningkat. Terminal Purabaya bakal menata dua seter yang dipergunakan ageman bus tersebut. Pembelian menyusul seher 25 dari 26.
Pegawai Sidan Purabaya Terminal Purabaya Veri Sigaharto mengatakan, proyek diumumkan dipergunakan ini. Pengiriman seter dilakukan untuk menyesuaikan dengan tren bus premium yang lebih banyak digunakan. Fasilitas bus premium akan disediakan di Terminal Purabaya, ini terlihat dari Labuan, kata Veri. Saat ini, tinggi seter masih sekitar 4 meter. Padahal, double decker atau sleeper double decker atau sleeper akan lebih banyak digunakan. Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, bus premium yang masuk ke terminal, kata Veri.

Pemkab Pangkas Anggaran BBM hingga Rp 10 Miliar

Dampak ASN Kerja dari Rumah

SIDOARJO – Seiring berlangsungnya Work From Home (WFH) ASN di hari Jumat, pemkab juga memangkas anggaran BBM yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran untuk bahan bakar kendaraan dikurangi hingga 25 persen. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Chusnul Inayah menjelaskan, anggaran BBM tidak berada dalam satu pos terpisah. Namun, tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Selain untuk kebutuhan teknis, pemkab juga mengalokasikan BBM untuk operasional.

"Yang kita pangkas BBM operasional seperti perjalanan dinas," kata Chusnul. Dia mengatakan, alokasi untuk BBM operasional Rp 40 miliar tahun ini. Nantinya anggaran akan dipangkas 25 persen atau Rp 10 miliar. Chusnul memastikan, pemangkasan BBM tak berdampak pada pelayanan. Anggaran untuk bahan bakar kendaraan di sektor pelayanan seperti truk angkutan sampah tetap. "Untuk kegiatan teknis seperti operasi

PEMOTONGAN ANGGARAN BBM

| Fokus pada bahan bakar untuk operasional | Total anggaran BBM Rp 40 miliar | Anggaran dipangkas 25 persen atau setara Rp 10 miliar | Pemkab juga bakal pengurangan mobil dinas |
|--|---------------------------------|---|---|
|--|---------------------------------|---|---|



Yang kita pangkas BBM operasional seperti perjalanan dinas." Chusnul Inayah Kepala BPKAD Sidoarjo

Kejala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Misbah Munir mengatakan bahwa pemangkas anggaran BBM dilakukan seiring dengan penyesuaian pola kerja ASN. Kebijakan juga diberlakukan seiring berkurangnya mobilitas kendaraan dinas. "Ini langkah konkret efisiensi," kata Misbah. Menurut dia, penggunaan kendaraan dinas saat ini diatur lebih selektif. Izin pemakaiannya ketat. Setiap pemakaian kendaraan dinas bakal diawasi secara ketat. (fa/hen)

Dorong Sinergi Pengusaha Muda Bangun Ekonomi

WAKIL Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menghadiri acara Halalbihalal yang digelar DPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sidoarjo di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu (15/4). Dalam kesempatan itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah dan pengusaha muda untuk memperkuat perekonomian daerah.

Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Melalui kolaborasi, mari kita berupaya menekan angka pengangguran tersebut."

Mimik Idayana Wakil Bupati Sidoarjo



DAPUR KE-12: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana (dua dari kanan) berdialog dengan pekerja SPPG di Desa Prung, Buduran.

SPPG Prasung Masak 3.000 Porsi untuk 4 Sekolah

SIDOARJO – Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana beres-beres di dapur SPPG karena ini menyangkut kesehatan anak-anak," ujarnya.



BADAN: Calon Jamaah Haji di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo.

45 Lansia Masuk Daftar Calon Jamaah Haji, Kesehatan Diperketat

KOTA-Senangatan menaunkan rukun Islam kelima begitu tinggi di kalangan calon jamaah haji (CJH) asal Sidoarjo tahun ini. Namun, di balik itu, ratusan jamaah lanjut usia membutuhkan perhatian khusus, terutama dari sisi kesehatan.
Dari total 2.691 CJH asal Sidoarjo, tercatat 45 jamaah berusia 70 hingga 90 tahun. Bahkan, jamaah tertua bernama Ramintan yang kini berusia 90 tahun tetap siap berangkat ke Tanah Suci.
Selain itu, sebanyak 386 jamaah lainnya berada di rentang usia 65 hingga 75 tahun dan masuk kategori penunantuan khusus.
Fitri Kepala Kementerian Haji (Kemenhaj) Kabupaten Sidoarjo, Elmas, mengatakan pihaknya memprioritaskan kesegaran kesehatan para jamaah, terutama yang tergolong lanjut usia maupun berisiko tinggi (ritu).
"Pemeriksaan kesehatan terus kami pastikan, khususnya bagi jamaah lanjut usia, terutama yang



ANGGER BONDAN/JAWA POS

KURANGI TITIK GENANGAN: Pembangunan saluran air difokuskan pada sisi selatan RSUD RT Notopuro Sidoarjo.

Cegah Banjir, RSUD RT Notopuro Bangun Drainase di Dekat IGD

SIDOARJO - RSUD RT Notopuro Sidoarjo sempat dilanda banjir pada Desember tahun lalu. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, RSUD membangun saluran air di sisi selatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang akan ditutup box culvert.

Direktur RSUD RT Notopuro Sidoarjo dr Atok Irawan menjelaskan bahwa pemasangan box culvert dilakukan dari sisi ti-

mur hingga barat area rumah sakit. "Saluran tersebut terhubung dengan drainase double deck di area parkir depan," katanya kemarin (15/4). Konektivitas jaringan air diharapkan mampu memperlancar aliran dan mengurangi titik genangan.

Panjang 200 Meter

Dari pengamatan, box culvert yang dipasang berukuran 150 x 150 x 120

sentimeter. Total panjang saluran yang dikerjakan sekitar 200 meter. Ukuran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan debit air di RSUD yang mencapai 2 hingga 4 meter kubik per detik.

"Saat ini, progres pengerjaan proyek telah mencapai sekitar 70 persen," ujarnya. Pembangunan ditargetkan rampung pada akhir Mei mendatang. Atok optimis pengerjaan

bakal rampung tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Untuk merealisasikan proyek, RSUD mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan hingga integrasi drainase yang sudah ada. Atok berharap proyek ini mampu membuat kawasan RSUD terbebas dari banjir dalam jangka panjang. (ful/hen)

Jawa Pos

syarat sekaligus pelapor

tersebut bukanlah penyero-

(eza/hen)

DLHK Tutup 8 Tempat Pengolahan Sampah Bermasalah

SIDOARJO - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo menertibkan 8 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) selama Januari-Maret. Selain tak berizin, keberadaan TPS juga dikeluhkan masyarakat karena mencemari lingkungan.

Plt Kepala DLHK Sidoarjo Arif Mulyono mengatakan bahwa keberadaan TPS untuk menampung volume sam-

lahan tidak berjalan maksimal," katanya kemarin (15/4).

Salah satu TPS yang ditinggalkan di Desa Trompoasri, Jabon. Lokasi yang dikategorikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut terpaksa ditutup karena beroperasi tanpa izin. Sampah di lokasi itu juga tidak dikelola dan hanya ditumpuk. Kondisinya diperparah dengan masuknya kiriman dari luar wilayah, termasuk

Temuan lain juga muncul di sejumlah titik lain yang tersebar di berbagai titik yak-



BERSERAKAN: TPS di Desa Trompoasri, Jabon, ditutup setelah dikeluhkan masyarakat.

Diperanyakan oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

ni di Desa Lajuk Porong, Desa Sariogo, Desa Keboansikep Gedangan, Desa Jogosatri,

dan Wilayat di Sukodono." Polanya relatif sama. Yakni lemahnya manajemen penge-

lola dan tidak konsistennya proses pemilahan sampah," tegasnya. (ful/hen)

Jawa Pos

Kemenhaj Pantau Kesehatan 431 CJH Lansia

Libatkan Seluruh Puskesmas

SIDOARJO - Calon jemaah haji (CJH) asal Sidoarjo akan mulai masuk asrama haji 26 April. Jelang keberangkatan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sidoarjo memantau kesehatan 431 CJH lanjut usia. Upaya pemantauan

dilakukan dengan melibatkan puskesmas setempat.

Plt Kepala Kemenhaj Sidoarjo Eliana mengatakan, aspek kesehatan menjadi perhatian utama. Terutama bagi jemaah yang berusia di atas 75 tahun. "Kami bekerja sama dengan dinkes dan puskesmas untuk memantau kondisi jemaah lansia," ujarnya kemarin (15/4).

Dari total 2.691 CJH asal



Kami bekerja sama dengan dinkes dan puskesmas untuk memantau kondisi jemaah lansia."

Eliana

Plt Kepala Kemenhaj Sidoarjo

Sidoarjo, tercatat 45 orang berusia antara 76 hingga 90 tahun yang mendapat perhatian utama. Selain itu, ada 386 jemaah berusia 65 hingga

75 tahun yang juga didampingi. "Jemaah tertua berusia 90 tahun bernama Raminnten, warga Kecamatan Tamanyang lahir 1935," katanya.

Jaga Kondisi Fisik

Eliana mengimbau agar CJH khususnya lansia menjaga kesehatan dan stamina sejak jauh hari. Saat ini musim panas. CJH harus menjaga kondisi fisik agar kuat menjalani rangkaian ibadah haji.

Menurut Eliana, CJH akan mulai masuk asrama haji 26 April. Seluruh persiapan sudah digelar. Termasuk melakukan vaksinasi meningitis. (eza/hen)

Jawa Pos

Dinsos Jatim Dampingi Remaja Telantar Asal Sidokumpul

Berkali-kali Kabur dari Rumah

SIDOARJO - Dinas Sosial (Dinsos) Jatim mengembalikan pengasuhan seorang anak telantar berinisial LO (13) kepada pihak keluarga di wilayah Sidokumpul, Sidoarjo Kota. Dinsos terus mendampingi remaja yang sudah lebih dari 10 kali kabur dari rumah tersebut. Sebelumnya, LO ditanga-

ni Dinsos Jatim setelah datang pada 31 Maret bersama petugas Terminal Purabaya. Dia mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari ibu tirinya dan ingin menyusul ayahnya ke Blitar.

Namun, hasil asesmen menunjukkan jika LO sudah berulang kali kabur dari rumah dengan pola cerita sama. Dia selalu mengeluh dengan kondisi rumah yang tidak lagi nyaman.



Tolak Dirujuk ke RS Menur

LO sempat akan dirujuk untuk perawatan kejiwaan di RS Menur Surabaya dengan rencana lanjutan ke UPT PPSAA Trenggalek. Akan tetapi, rencana tersebut tidak berjalan dengan mulus. Dia menolak dan

LAYANAN SOSIAL: Petugas Dinsos Jatim menerima surat tanda penyerahan LO dari keluarga.

mengalami tantrum saat hendak dirujuk serta bersikeras hanya ingin kembali ke keluarganya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Dinsos Jatim memutuskan mengembalikan LO kepada keluarga Senin (13/4) malam. Ada komitmen tertulis terkait pengasuhan dan perlindungan anak.

Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Jatim Sukardi mengatakan bahwa

pendampingan tidak berhenti setelah pengembalian. "Dinsos masih monitoring agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Sukardi menegaskan keputusan tersebut telah melalui kajian profesional. Dalam kasus LO, pengembalian kepada keluarga dipilih karena menjadi opsi paling kondusif bagi stabilitas emosional anak. "Kami melihat riwayat perilaku dan dinamika keluarga," ujarnya. (ful/hen)

Jawa Pos



KOMITMEN: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana (empat dari kiri) saat sidak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tarik.

■ Sidak Dapur MBG di Tarik Wabup Pastikan Standar Tinggi dan Dorong Kolaborasi KDMP

Komitmen menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditunjukkan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana. Turun langsung ke lapangan, ia menyisir dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tarik untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai standar, mulai dari pengolahan hingga pengelolaan limbah.

Diky Putra Sansiri, Wartawan Radar Sidoarjo

DALAM inspeksi mendadak (sidak) Rabu (15/4) pagi, Mimik mengunjungi dua lokasi, yakni dapur SPPG Desa Mergosari dan Desa Singogalih.

Ia meninjau detail fasilitas dapur, ruang penyimpanan bahan baku, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sekaligus mengecek menu makanan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Wabup yang akrab disapa Mak Mimik itu mem-

berikan apresiasi khusus kepada dapur SPPG Mergosari. Menurutnya, pengelolaan dapur di lokasi tersebut sudah memenuhi standar tinggi dalam penyediaan makanan bergizi.

"Dapur SPPG Mergosari ini patut diacungi jempol. Mulai dari fasilitas dapur, ruang penyimpanan bahan baku, hingga IPAL semuanya sudah sesuai standar. Ini bisa menjadi contoh bagi dapur SPPG lainnya



● Ke Halaman 10



Wabup Pastikan Standar...

di Sidoarjo," ujar Wabup Mimik, Rabu (15/4). Ia menegaskan, standar tersebut sangat penting untuk menjamin kual-

tas makanan yang dikonsumsi para siswa sebagai bagian dari program pemenuhan gizi nasional.

Tak hanya soal fasilitas, Mimik juga menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok bahan pangan. Ia

mendorong pengelola dapur SPPG untuk menjalin kerja sama dengan distributor dan koperasi lokal, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Kolaborasi dengan koperasi dan

distributor sangat penting agar suplai bahan baku tetap terjaga, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat lokal," tegasnya.

Menurutnya, keberadaan dapur

SPPG merupakan bagian dari implementasi program prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto. (dik/vga)

Mendikdasmen: Butuh Kolam...

Ia juga mengapresiasi langkah Pe-

embangan kelas olahraga di sekolah

Terkait dukungan anggaran Abdul

dalam membangun fasilitas untuk 16



Sampah Liar Kian Marak, DLHK Siagakan 700 Petugas dan CCTV

KOTA-Ancaman denda hingga Rp 50 juta belum cukup ampuh menekan praktik pembuangan sampah liar di Kabupaten Sidoarjo. Di tengah maraknya pelanggaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memilih memperkuat pengawasan dengan menurunkan ratusan petugas serta memasang kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan.

Plt Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono, mengungkapkan pihaknya telah menyiagakan sekitar 700 personel untuk menjaga kebersihan, khususnya di jalan-jalan protokol. Pengawasan difokuskan pada jalur utama, mulai dari kawasan Waru hingga



BUTUH PENANGANAN: Sampah liar yang masih banyak terlihat di sejumlah pinggir jalan di Sidoarjo.

Porong, termasuk wilayah kota, Tarik, dan Prambon. "Di jalan kabupaten, mulai

Jalan Raya Waru sampai Jalan Raya Porong, termasuk kawasan kota hingga Jalan

Raya Tarik dan Jalan Raya Prambon, sudah ada petugas. Totalnya sekitar 700

personel," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/3).

Selain itu, DLHK juga memasang CCTV di sejumlah titik strategis. Teknologi ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pelaku pembuangan sampah ilegal, termasuk merekam nomor kendaraan yang digunakan.

Meski regulasi telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), Arif mengakui penegakan hukum masih belum maksimal. Menurutnya, tindakan tegas perlu dilakukan secara berkala agar menimbulkan efek jera.

"Selama saya menjabat Plt, penegakan belum maksimal. Padahal sesekali perlu ditegaskan agar ada efek

● Ke Halaman 10



Sampah Liar...

jera. Pernah ada sidang tipiring, tapi dendanya masih relatif kecil," ungkapnya.

Ia menambahkan, persoalan sampah liar tidak hanya terjadi di jalan

utama, tetapi juga di jalan-jalan desa yang belum terjangkau layanan kebersihan harian.

Karena itu, peran pemerintah kecamatan dan desa sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan di tingkat lokal.

"Untuk jalan-jalan kecil memang belum ada petugas penyapuan setiap hari. Di sinilah peran kecamatan dan desa sangat penting untuk membantu monitoring dan penanganan," jelasnya.

Penanganan sampah juga dilakukan di aliran sungai. DLHK bekerja sama dengan Satgas Sungai dari Dinas PU

Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo untuk membersihkan sampah yang terbawa arus.

"Sampah dari sungai kami kategorikan sebagai sampah liar. Diangkut oleh Satgas Sungai, lalu dibawa menggunakan truk DLHK ke tempat pembuangan," terangnya.

Arif menegaskan, kunci utama

penanganan sampah tetap pada kesadaran masyarakat. Tanpa partisipasi aktif warga, upaya pemerintah tidak akan berjalan optimal.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. (dik/vga)

Kejari Panggil Saksi...

perangkat desa terkait alih fungsinya.



✓ Mendikdasmen: Butuh Kolam Renang, Pemerintah Pusat Siap Dukung

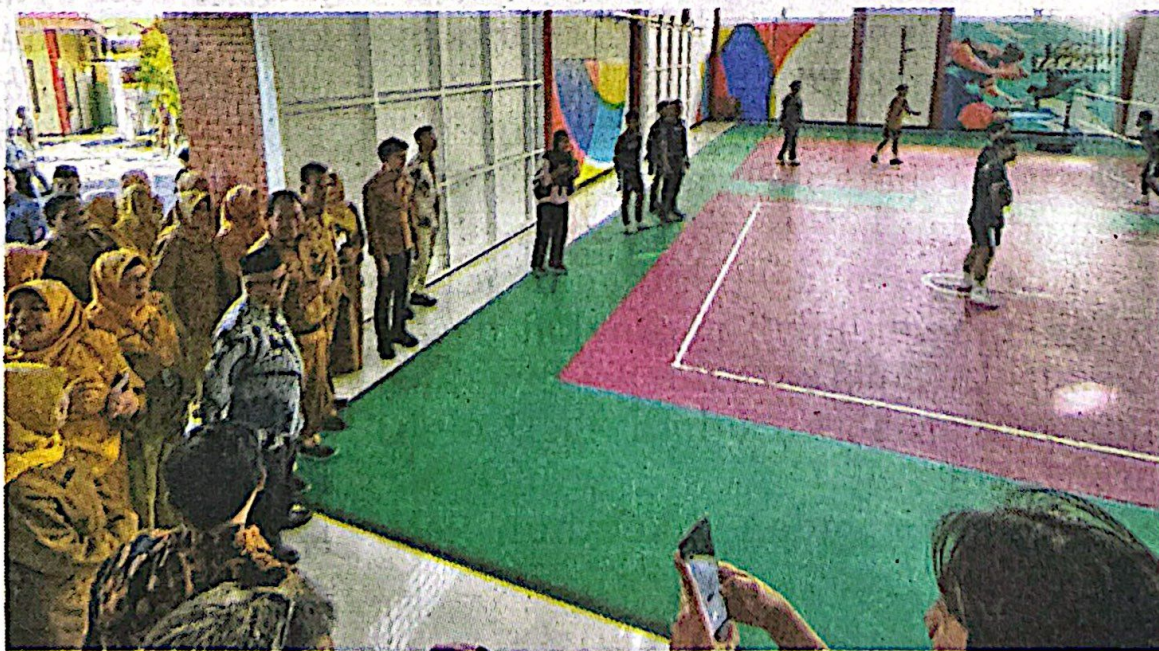
KOTA-Dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur di Sidoarjo semakin menguat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti menyatakan kesiapan membantu peningkatan fasilitas penunjang.

Salah satu kebutuhan mendesak adalah pembangunan kolam renang.

Selama ini, siswa harus menjalani latihan di luar sekolah, yakni di GOR Sidoarjo. Kondisi tersebut dinilai kurang efektif karena menyita waktu belajar sekaligus latihan.

Dalam kunjungannya ke SMANOR Sidoarjo, Selasa (14/4), Abdul Mu'ti menegaskan pentingnya penguatan sekolah berbasis olahraga sebagai bagian dari

● Ke Halaman 10



DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

ATLET: Mendikdasmen RI Abdul Mu'ti (batik biru) saat meninjau gedung sepak takraw SMANOR Sidoarjo.

layout: hadi

Mendikdasmen: Butuh Kolam...

pembinaan atlet sejak usia dini. Menurutnya, sekolah seperti SMANOR dirancang dengan kurikulum khusus yang fleksibel dan menyesuaikan program latihan siswa.

"Atlet-atlet nasional harus dibina sejak dini. Sekolah model seperti SMANOR ini memiliki kurikulum khusus dan pembelajaran yang menyesuaikan program latihan," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menghadirkan sekolah berbasis olahraga, mengingat jumlahnya masih sangat terbatas di Indonesia.

"Kami berterima kasih kepada Pemprov Jawa Timur yang telah menyelenggarakan program sekolah olahraga ini. Secara nasional jumlahnya memang masih terbatas," tambahnya.

Selain peningkatan fasilitas, Mendikdasmen juga mendorong peng-

embangan kelas olahraga di sekolah umum. Program tersebut memungkinkan satu sekolah memiliki kelas khusus untuk cabang olahraga tertentu dengan melibatkan berbagai mitra.

"Kami sudah mulai membahas dengan Menpora untuk menghadirkan kelas olahraga di sekolah. Nantinya, dalam satu sekolah bisa ada kelas khusus yang fokus pada cabang olahraga tertentu dan bekerja sama dengan berbagai pihak," jelasnya.

Terkait dukungan anggaran, Abdul Mu'ti menyebut pihaknya masih akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah. Meski begitu, peluang bantuan tetap terbuka. "Mudah-mudahan jika ada anggaran tahun ini, kami bisa membantu pengembangan sekolah olahraga seperti SMANOR," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai berharap kunjungan tersebut membawa dampak nyata, terutama

dalam pemenuhan fasilitas untuk 16 cabang olahraga yang telah berjalan.

Ia menegaskan, keberadaan kolam renang menjadi kebutuhan paling mendasak. Lahan sebenarnya sudah tersedia, namun pembangunan masih terkendala anggaran. "Selama ini siswa harus latihan renang di luar, ke GOR Sidoarjo. Ini cukup menyulitkan karena waktunya berdekatan dengan pembelajaran. Jika ada kolam di sekolah, tentu akan jauh lebih efektif," pungkasnya. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

08.21



WATCH

Wabup dan Pimpinan DPRD Sidoarjo Sidak SPPG di Kecamatan Tarik

📍 wartanusa

🕒 15 April 2026



SIDOARJO – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, bersama Wakil Ketua II DPRD Sidoarjo, Kayan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Mergosari dan Desa Singogalih, Kecamatan Tarik, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakshmi, serta Camat Tarik, Rofik. Kehadiran sejumlah pejabat ini merupakan bagian dari upaya koordinasi lintas sektor dalam pengawasan pelayanan gizi dan keamanan pangan.

Dalam sidak tersebut, Wakil Bupati meninjau langsung proses pengolahan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Selain itu, dilakukan pula pengecekan terhadap kebersihan dapur, sistem penyimpanan bahan pangan, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).



Menurut Mimik Idayana, hasil peninjauan menunjukkan bahwa fasilitas dan proses di SPPG tersebut telah memenuhi standar kebersihan dan higienitas yang ditetapkan.

Ia menjelaskan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Lebih lanjut, Mimik menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Kami mengingatkan agar seluruh pelaksanaan program dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Wabup juga menyampaikan bahwa pengelolaan dapur SPPG di Mergosari dapat menjadi contoh bagi pengelolaan SPPG di wilayah lain, selama tetap dilakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala.(dar/nata/red)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

08.18

publiknews.com

Republik News

Republik TV Oase Iman Mom Female Kesi

Ketua DPRD Sidoarjo Hadiri Peluncuran Revitalisasi Sekolah, Anggaran Capai Rp45 Miliar

Redaksi 3 Min Baca
15 April 2026

Foto : Ketua DPRD kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M. bersama Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana beserta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Tirta Adi, M.Pd menyambut kedatangan Menteri pendidikan Dasar dan menengah Republik Indonesia, Prof. Sr. Abdul Mu'ti, M.Ed di SMP 4 Sidoarjo.

Republiknews.com, SIDOARJO –

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan terus diwujudkan melalui program revitalisasi sekolah yang kini semakin diperluas cakupannya. Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., turut menghadiri peluncuran perluasan Program Revitalisasi Sekolah di SMP Negeri 4 Sidoarjo, Selasa (14/4/2026).

Program strategis ini secara resmi diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., sebagai bagian dari upaya transformasi dunia pendidikan menuju standar yang lebih berkualitas dan merata.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Dr. Tirta Adi, M.Pd., bersama sejumlah pejabat daerah, kepala sekolah, dan tenaga pendidik.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa program revitalisasi sekolah menjadi salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Ia menegaskan bahwa lingkungan belajar yang layak dan modern menjadi faktor penting dalam mencetak generasi unggul.

"Revitalisasi ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari transformasi pendidikan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman," ujarnya.



Pada kesempatan tersebut, pemerintah pusat juga mengumumkan peningkatan signifikan jumlah sekolah yang mendapatkan manfaat dari program ini. Jika pada tahun 2025 hanya 29 satuan pendidikan yang direvitalisasi, kini jumlahnya meningkat menjadi 45 sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

Peningkatan jumlah tersebut turut diiringi dengan lonjakan anggaran yang cukup besar. Untuk mendukung program ini, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp45 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai, tambahan kuota dan anggaran ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di daerah.

"Ini langkah yang sangat positif. Dengan adanya tambahan anggaran dan perluasan program, kami berharap kualitas pendidikan di Sidoarjo semakin meningkat dan merata," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sidoarjo akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran dan transparan. Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan.

Menurutnya, revitalisasi sekolah akan berdampak langsung terhadap kenyamanan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar.

"Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan semangat belajar siswa meningkat dan kualitas pendidikan semakin optimal," ujarnya.

Program revitalisasi sekolah ini mencakup perbaikan ruang kelas, pembangunan fasilitas pendukung, hingga peningkatan standar keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Dengan adanya perluasan program dan dukungan anggaran yang besar, diharapkan transformasi pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi generasi masa depan.

(AHF)

Tag: # Sidoarjo





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Foto :Halal bihalal HIPMI di Fave Hotel Sidoarjo.

Republiknews.com, SIDOARJO – Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdilllah Nasih, menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sidoarjo, Rabu (15/4/2026). Acara yang mengusung tema “Reconnect & Grow: From Silaturahmi to Synergy” ini berlangsung di lantai 1 Hotel Fave Sidoarjo dan menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar pelaku usaha sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdilllah Nasih, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, S.H., M.M., jajaran Forkopimda, serta pimpinan perguruan tinggi swasta di wilayah Sidoarjo. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sinergi lintas sektor demi kemajuan ekonomi daerah.

Ketua Panitia Halal Bihalal, Irmawati Subagio, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar tradisi pasca-Idulfitri, melainkan memiliki makna strategis sebagai wadah memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan antar anggota HIPMI.

“Halal bihalal ini bukan hanya seremoni, tetapi momentum untuk membangun kolaborasi. Dari silaturahmi kita bangun kepercayaan, dan dari kepercayaan lahir sinergi,” ujar Irmawati.



Ia juga menambahkan bahwa HIPMI bukan hanya sebuah organisasi, melainkan sebuah ekosistem yang saling terhubung dan terus berkembang. Oleh karena itu, pihaknya berharap kegiatan ini mampu membuka peluang kerja sama lintas sektor yang lebih luas, baik antara pelaku usaha, pemerintah, maupun dunia pendidikan.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama, menyampaikan bahwa kegiatan halal bihalal ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pengusaha muda dengan pemerintah serta berbagai stakeholder lainnya.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menciptakan ruang dialog yang produktif. HIPMI siap menjadi jembatan antara pengusaha muda dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sidoarjo,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih turut mengapresiasi inisiatif HIPMI dalam menyelenggarakan kegiatan yang tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga mendorong kolaborasi nyata. Ia menilai, peran pengusaha muda sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Kami di DPRD tentu mendukung penuh upaya-upaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan akademisi sangat diperlukan untuk menciptakan inovasi dan peluang usaha baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap HIPMI Sidoarjo dapat terus menjadi motor penggerak lahirnya wirausahawan muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.

Kegiatan halal bihalal ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain diisi dengan sambutan, acara juga menjadi ajang networking bagi para peserta untuk saling bertukar ide, memperluas relasi bisnis, serta menjajaki peluang kerja sama.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara HIPMI, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

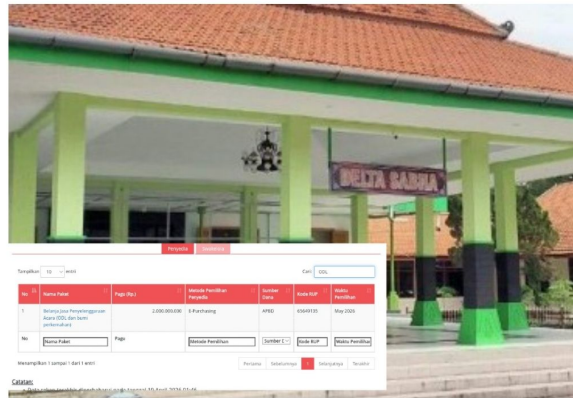
08.22

📶 🔋 67

Berita

Anggaran Rp 2 Miliar Untuk ODL dan Perkemahan Disorot, Dinas Sebut Masih Usulan Efisiensi

Media Sorot Mata 10 April 2026



SIDOARJO , **MEDIASORTMATA.COM** – Sebuah anggaran jumbo kembali muncul dalam rencana pengadaan di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini, bernilai Rp2 miliar dialokasikan untuk kegiatan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (ODL dan bumi perkemahan) oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Data RUP dengan kode 65649135 menunjukkan, kegiatan tersebut hanya berupa 1 paket pekerjaan dengan jadwal pelaksanaan pada Juni 2026. Metode yang digunakan adalah e-purchasing, dengan sumber dana dari APBD.

Besarnya anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial dan temporer ini menimbulkan tanda tanya.

Terlebih lagi, durasi pelaksanaan yang relatif singkat dinilai belum cukup menjelaskan urgensi penggunaan dana hingga miliaran rupiah.

Minimnya rincian dalam dokumen publik juga menjadi sorotan. Tidak dijelaskan secara detail terkait jumlah peserta, lokasi spesifik kegiatan, hingga komponen pembiayaan yang menyusun angka Rp2 miliar tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp, pihak Dinas Pariwisata memberikan penjelasan singkat. “Salam mas....ini salah 1 km usulkan utk efisiensi... Sampai saat ini belum berproses. Sami2, mhn mf ini pas Rpt teknis aplikaisi,” tulisnya, Kamis (9/4/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa paket kegiatan tersebut masih dalam tahap usulan dan belum masuk proses pelaksanaan.

Di sisi lain, dokumen juga mencatat bahwa pengadaan ini tidak memasukkan aspek pengadaan berkelanjutan (SPP), baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Padahal, prinsip tersebut mulai menjadi standar dalam tata kelola belanja pemerintah modern.

Meski dianggap diperuntukkan bagi usaha kecil dan menggunakan produk dalam negeri, transparansi dalam proses e-purchasing tetap menjadi tuntutan utama.

Tanpa keterbukaan, potensi inefisiensi hingga pemborosan anggaran bisa menjadi sorotan publik. Pengamat kebijakan publik menilai, kegiatan kepemudaan memang penting, namun harus diukur dengan dampak nyata, bukan sekedar seremonial.

“Yang jadi soal bukan kegiatannya, tapi apakah nilai anggarannya sebanding dengan manfaatnya. Itu harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, masyarakat kini menunggu apakah rencana anggaran Rp2 miliar ini akan dilanjutkan, direvisi, atau justru dibatalkan dalam skema efisiensi anggaran daerah.
(GIS/TIM)

Tag:

Anggaran Rp 2 Miliar Untuk ODL dan





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

08.14

69

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Kritik Keberangkatan Sekda ke Korea Selatan, Dinilai Tak Sensitif di Tengah Isu Efisiensi

Imam Hambali

Kamis, 16 Apr 2026 00:04 WIB



Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin

Sidoarjo, JatimUpdate.id -

Keberangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo ke Korea Selatan untuk mengikuti pelatihan cyber security menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.



Sabtu, 11 Apr 2026 15:02 WIB

**Pembangunan Perkuat
Kolaborasi Tekan Angka
Kematian Ibu dan Bayi**

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, mempertanyakan urgensi perjalanan dinas tersebut di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.

Menurut Rizza, momentum keberangkatan Sekda dinilai kurang tepat.

Pasalnya, publik Sidoarjo masih diselimuti kegaduhan usai polemik acara buka bersama bertema "Ala Bollywood" yang sebelumnya menuai kritik karena dianggap terlalu glamor.

"Kami menyayangkan keberangkatan ini. Di satu sisi pemerintah mendorong efisiensi anggaran, namun di sisi lain pimpinan birokrasi justru melakukan perjalanan luar negeri yang urgensinya patut dipertanyakan," ujar Rizza, Rabu (15/4/2026).





Pria yang juga menjabat sebagai Kasatkorwil Banser Jawa Timur itu menilai, langkah tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

Ia mempertanyakan apakah pelatihan tersebut benar-benar membutuhkan kehadiran langsung seorang Sekda.

Lebih lanjut, Rizza menegaskan bahwa pelatihan terkait keamanan siber semestinya diikuti oleh pejabat teknis yang membidangi langsung, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bukan pejabat pada level manajerial tertinggi di lingkungan ASN.



Sabtu, 14 Mar 2026 10:17 WIB

Sekda Sidoarjo Minta Maaf soal Buka Puasa Tema Bollywood yang Viral di Media Sosial

Ia juga mendorong agar ke depan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada kalangan muda yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi untuk mengikuti pelatihan serupa, guna mendukung keberlanjutan transformasi digital.

Tak hanya itu, Komisi A DPRD Sidoarjo berencana meminta penjelasan resmi terkait dasar penunjukan Sekda sebagai peserta pelatihan tersebut. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui manfaat konkret dari kegiatan itu bagi daerah.

“Sebagai wakil rakyat, kami punya tanggung jawab untuk bertanya: seberapa urgen pelatihan tersebut hingga harus Sekda yang berangkat? Kita butuh efektivitas, bukan sekadar seremoni perjalanan dinas,” tegasnya. (ih/yh)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KILAS BIROKRASI

Kadis PMD Minta Capilkades Harus Tahu Data Statistik Desa

Sidoarjo, Bhirawa

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, Probo Agus Sunarno SSos MSi, berpendapat para calon peserta Pilkades serentak di Kabupaten Sidoarjo harus tahu kondisi masalah yang dihadapi di desa.

Sehingga visi misinya bila terpilih sebagai Kepala desa kelak, bisa selaras dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi di desanya.

Misalnya tentang persoalan sosial, ekonomi, pengangguran, kesehatan, pendidikan, olah raga, infrastruktur, agama, sampah, kebersihan, pertanian, peternakan dan masih banyak lagi lainnya.

“Visi misi seorang pemimpin harus bisa selaras dengan potensi yang ada di desa dan masalah di desa, jangan diluar dari kemampuan desanya,” komentar Probo, Selasa (14/4) kemarin, saat menghadiri MoU pelaksanaan Desa Cantik atau desa cinta statistik 2026 di wilayah kecamatan Krembung.

Misalnya seorang calon peserta Pilkades menyampaikan visi misinya akan membuat desanya bebas dari Narkoba, karena di desa itu ditengarai banyak anak-anak muda yang kerap menjadi pemakai Narkoba.

Atau juga visi akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya di desa setempat, karena dari data, banyak lulusan sekolah di desa itu, masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan.

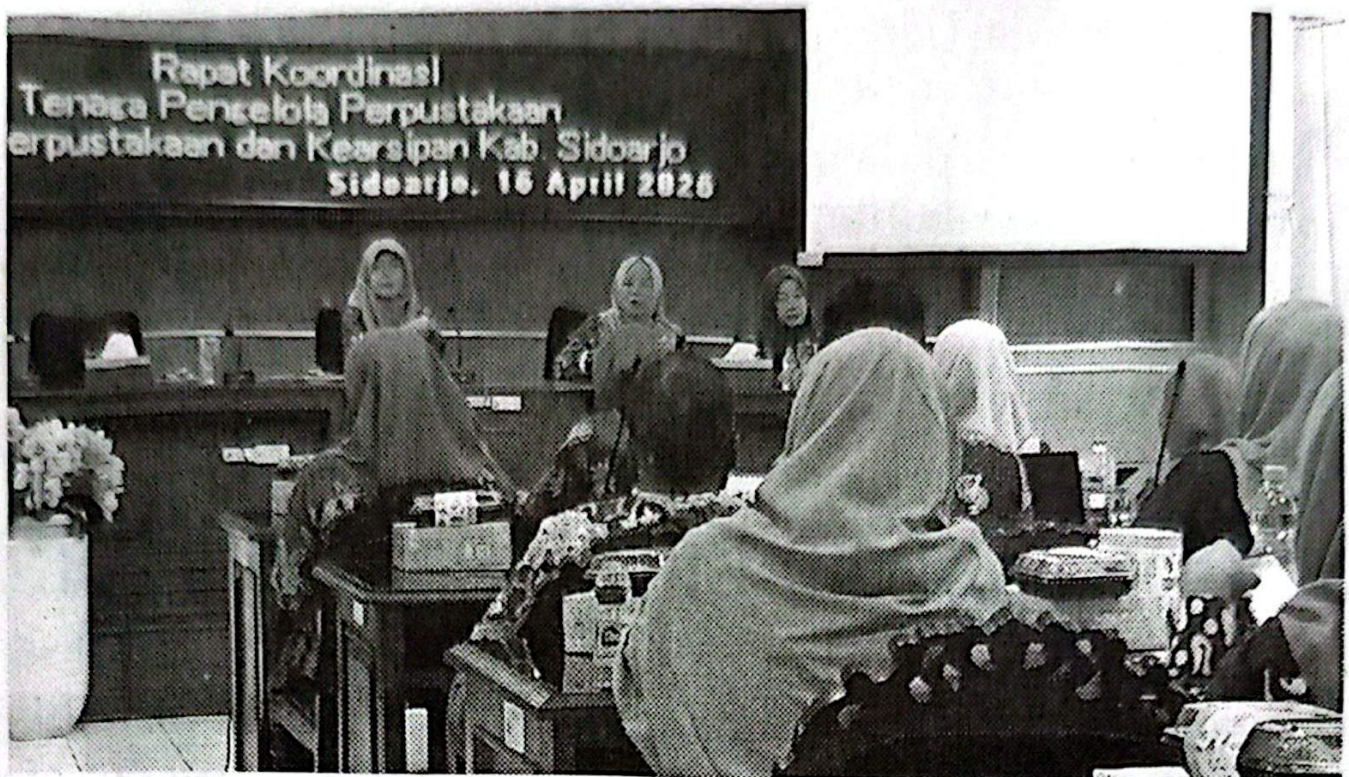
“Panitia Pilkades di Sidoarjo perlu diberikan masukan, agar para peserta Pilkades menyampaikan visi misinya bisa sesuai data yang sedang dihadapi oleh desa setempat, nanti akan kita buat edaran, ujarnya.

Menurut Probo, di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026 ini ada 80 desa yang sedang melaksanakan Pilkades serentak. Saat ini masih dalam tahapan penentuan calon. Untuk sementara sudah ada 78 desa yang memiliki calon. Sedang dua desa masih belum menetapkan calon. [kus.dre]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



alikus/bhirawa

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo menghadirkan narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim untuk mengajari mendapatkan NPP.

Pengelola Perpustakaan Sekolah di Sidoarjo Diajari Daftar NPP

Sidoarjo, Bhirawa

Pengelola perpustakaan sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo dilatih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim untuk bisa mendaftarkan Nomor pokok Perpustakaan (NPP) kepada Perpustakaan Nasional. Pustakawan ahli madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov Jatim, Sri Purwati, mengatakan dengan mendapatkan NPP, Perpustakaan Nasional akan bisa mendata perpustakaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo bahkan Perpustakaan se Indonesia.

"Kalau perpustakaan tidak punya NPP, ibaratnya seperti hutan rimba, Perpustakaan Nasional tidak bisa mendeteksi keberadaan perpustakaan sekolah yang ada," komentar Sri Purwati, Kamis (16/4) kemarin, di ruang delta karya, Setda Sidoarjo, yang memberikan sosialisasi kepada para petugas perpustakaan sekolah di Kabupaten Sidoarjo, dalam Rakor yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo .

Kalau ada NPP, Perpustakaan Nasional akan bisa tahu di sekolah itu sudah ada layanan perpustakannya atau belum. Sesuai undang-undang, sebetulnya keberadaan perpustakaan sekolah itu wajib. Karena keberadaan perpustakaan sekolah bisa mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Namun terkadang ditunda. Sekolah mengutamakan kebutuhan yang lain. [kus.wwn]

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

HIPMI Sidoarjo Dorong Kolaborasi dengan Pemerintah

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menghadiri halal-bihalal yang diselenggarakan DPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Rabu 15 April 2026 di Fave Hotel Sidoarjo.

Dalam acara ini, Wakil Bupati Sidoarjo menyampaikan, tema Reconnect and Grow: From Silaturahmi to Sinergi sangat relevan. Tema ini merefleksikan harapan bahwa interaksi awal yang terjalin dapat berkembang menjadi kolaborasi strategis yang signifikan, dengan tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi yang kuat.

“Kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, tetapi juga merupakan wadah diskusi informal yang berpotensi menciptakan peluang usaha. Dengan saling mengenal, kita dapat membangun koneksi yang bermanfaat untuk pengembangan usaha kita,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa HIPMI memiliki energi yang besar karena diisi oleh generasi muda yang inovatif dan penuh semangat. Peran ini sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini tentunya dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.

“Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Melalui kolaborasi, mari kita berupaya menekan angka pengangguran tersebut,” ajaknya.

Ketua DPC HIPMI Sidoarjo, Zakaria Dimas Pratama, menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga diharapkan dapat menciptakan sinergi dan kolaborasi guna membangun perekonomian

di Kabupaten Sidoarjo. (md/rus)



Halalbihalal HIPMI Sidoarjo.



DAPUR KE-12: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana (dua dari kanan) berdialog

SPPG Prasung Melayani 3.000 Porsi untu

SIDOARJO - Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, kemarin (16/4). Dapur tersebut menjadi SPPG ke-12 di wilayah Buduran dan ditargetkan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat.

Mimik mengharapkan, dapur bisa menjaga standar kebersihan dalam operasional dapur SPPG. "Kebersihan harus dijaga. Semua petugas wajib mengikuti standar

karena ini menyangkut anak-anak," ujarnya.

Dapur SPPG Desa Prasuganakan melayani sekitar 3.000 porsi untuk siswa di empat selibuh ibu hamil, menyusui, dan masyarakat di wilayah sekitar. Distribusinya akan menjangkau radius 5 kilometer dari lokasi dapur.

Mimik menambahkan, dapur SPPG Prasug ini akan berkolaborasi dengan Dapur Desa Merah Putih Prasug. "Membantu

petugas wajib mengikuti standar Prasung. Mungkin nanti

Jawa Pos

Kakak-Adik Bakal Bertarung di Pilkades Rejeni

SIDOARJO - Pendaftaran gelombang ketiga calon kepala desa (cakades) untuk pilkades serentak tahun 2026 ditutup Rabu (15/4). Dua desa yang sebelumnya kekurangan calon yakni Balongdowo (Candi) dan Rejeni (Krembung) dipastikan sudah lengkap. Kini, 80 desa siap melanjutkan tahapan pilkades.

Khusus untuk Rejeni, petahana Affandi Ahmad dipastikan maju lagi. Menariknya, dia bakal mendapat lawan yang cukup berat. Affandi bakal bertarung dengan Afriliyani yang juga adiknya.

Tidak hanya Rejeni. Pilkades di Bluru juga akan diramaikan kandidat yang masih sekeluarga. Pasutri Mochammad Fatkhur dan Etty Sofiaty bakal bersaing di pemilihan.



Secara regulasi tidak ada pembatasan terkait hubungan keluarga dalam pencalonan kepala desa.”

Hernita Hadi Lestari
Kabid Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dinas PMD Sidoarjo

ngan keluarga dalam pencalonan kepala desa,” katanya kemarin (16/4).

Dia mengatakan, semua warga memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri selama syarat admi-

Imbau Jaga Kondusivitas

Kabid Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dinas PMD Sidoarjo Hernita Hadi Lestari mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak melanggar aturan. "Secara regulasi tidak ada pembatasan terkait hubu-

nistrasi terpenuhi. "Yang terpenting prosesnya berjalan sesuai aturan dan masyarakat bisa menentukan pilihan secara objektif," ujarnya. Hernita mengimbau seluruh pihak menjaga kondusivitas selama tahapan pilkades berlangsung. Terutama para pendukung. **(ful/hen)**

Jawa Pos

Pemkab Pangkas Anggaran BBM hingga Rp 10 Miliar

Dampak ASN Kerja dari Rumah

SIDOARJO – Seiring berlangsungnya *Work From Home* (WFH) ASN di hari Jumat, pemkab juga memangkas anggaran BBM yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran untuk bahan bakar kendaraan dikurangi hingga 25 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Chusnul Inayah menjelaskan, anggaran BBM tidak berada dalam satu pos terpusat. Namun, tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Selain untuk kebutuhan teknis, pemkab juga mengalokasikan BBM untuk operasional.

"Yang kita pangkas BBM operasional seperti perjalanan dinas," kata Chusnul. Dia mengatakan, alokasi untuk BBM operasional Rp 40 miliar tahun ini. Nantinya anggaran akan dipangkas

PEMOTONGAN ANGGARAN BBM

Fokus pada bahan bakar untuk operasional

Total anggaran BBM Rp 40 miliar

Anggaran dipangkas 25 persen atau setara Rp 10 miliar

Pemkab juga batasi penggunaan mobil dinas

Sumber: Pemkab Sidoarjo



Yang kita pangkas BBM operasional seperti perjalanan dinas."

Chusnul Inayah
Kepala BPKAD Sidoarjo

25 persen atau Rp 10 miliar.

Chusnul memastikan, pemangkasan BBM tak berdampak pada pelayanan. Anggaran untuk bahan bakar kendaraan di sektor pelayanan seperti truk angkutan sampah tetap. "Untuk kegiatan teknis seperti opera-

sional truk sampah di DLHK atau BBM untuk pompa di dinas PU tidak ada perubahan," tambah Chusnul.

Perketat Izin Pemakaian Mobil Dinas

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Misbahul Munir mengatakan bahwa pemangkasan anggaran BBM dilakukan seiring dengan penyesuaian pola kerja ASN. Kebijakan juga diberlakukan seiring berkurangnya mobilitas kendaraan dinas. "Ini langkah konkret efisiensi," kata Misbahul.

Menurut dia, penggunaan kendaraan dinas saat ini diatur lebih selektif. Izin pemakaiannya ketat. Setiap pemakaian kendaraan dinas bakal diawasi secara ketat. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Semalam, Empat Piton Berkeliaran di Permukiman

SIDOARJO - Petugas BPBD Sidoarjo disibukkan dengan banyaknya ular piton yang keluyuran. Petugas mengevakuasi empat piton pada Rabu (15/4) malam di empat kecamatan berbeda.

Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu menga-

takan, laporan pertama diterima sekitar pukul 21.20 WIB dan terus berdatangan hingga menjelang tengah malam. "Total ada empat penanganan evakuasi piton dalam satu malam," ujarnya. Satu ular dievakuasi dari Desa Wonokarang, Balong-

berada di sekitar pukul 22.06. Ular diketahui masuk ke dalam rumah dan membuat takut keluarga yang hendak tidur. Selain itu, evakuasi juga dilakukan di wilayah Sedati dan Taman, serta kawasan Kota Sidoarjo. "Kebanyakan memang

berada di sekitar area sungai dan persawahan," katanya. (eza/hen)

BIKIN PANIK
Petugas Rescue Damkar Pos Sukodono mengamankan piton yang masuk rumah warga Desa Ketegan, Taman, Rabu (15/4) malam.



Jawa Pos

SPPG Prasung Layani 3.000 Penerima

■ Dorong Libatkan UMKM dan Kopdes Merah Putih

BUDURAN-Upaya memperkuat pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal mulai diwujudkan di Desa Prasung, Kecamatan Buduran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru diresmikan diproyeksikan mampu melayani hingga 3.000 penerima manfaat dari berbagai kelompok rentan.

Peresmian dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kamis (16/4) pagi. Operasional dapur gizi tersebut akan menyasar siswa dari delapan sekolah, ibu hamil, ibu

Mimik menegaskan, keberadaan SPPG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus menjadi penggerak ekonomi desa melalui kolaborasi dengan pelaku UMKM dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Dapur SPPG ini bisa membuka lapangan kerja dan bekerja sama dengan UMKM serta Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih," ujar Mimik, yang akrab disapa Mak Mimik.

Ia mendorong agar bahan pangan seperti ikan, tempe, dan tahu diproduksi dari desa sendiri. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.



DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

BEROPERASI: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana (kanan) saat melakukan pengecekan di dapur SPPG Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kamis (16/4).



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dorong Sinergi...

berkembang menjadi kolaborasi strategis demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi momentum mempekerat tali silaturahmi, tetapi juga wadah diskusi informal yang berpotensi menciptakan peluang usaha. Dengan saling mengenal, kita dapat membangun koneksi yang bermanfaat untuk pengembangan usaha," katanya.

Ia menilai HIPMI memiliki energi besar karena dihuni generasi muda

yang inovatif dan penuh semangat. Peran tersebut dinilai sangat penting dalam membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menekan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.

"Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Melalui kolaborasi, mari kita berupaya menekan angka pengangguran tersebut," ujarnya.

Mimik juga berharap pertemuan itu tidak hanya memberi kepuasan secara seremonial, tetapi mampu memunculkan gagasan baru, mem-

perluas jaringan relasi, serta membangkitkan semangat baru bagi para pelaku usaha muda.

"Para pengusaha muda memiliki peran yang esensial. Karena itu, komunikasi dan diskusi menjadi penting, mengingat tujuan kita bersama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Sidoarjo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkaskannya.

Sementara itu, Ketua DPC HIPMI Sidoarjo Zakaria Dimas Pratama mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga upaya membangun sinergi dan

kolaborasi demi memperkuat perekonomian daerah.

"Kami punya target dan mimpi bahwa Kabupaten Sidoarjo ingin menjadi episentrum penggerak perekonomian daerah yang dikhususkan untuk anak-anak muda," katanya.

Ia menjelaskan, HIPMI Sidoarjo saat ini menjadi wadah bagi 172 pengusaha muda untuk mendapatkan pembinaan, pengembangan, dan kolaborasi usaha. Organisasi tersebut diibaratkan sebagai kawah candradimuka tempat para pengusaha muda ditempa, diperluas jejaringnya, dan difasilitasi mengembangkan bisnis

masing-masing.

Zakaria berharap kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah terus diperkuat agar tercipta iklim usaha yang kondusif, lahir usaha-usaha baru, serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

"Kami berharap HIPMI dapat terus bersinergi dengan pemerintah ke depan guna mendorong munculnya usaha-usaha baru. Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menekan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya. (dik/vga)



Dorong Sinergi Pengusaha Muda Bangun Ekonomi

WAKIL

Bupati
Sidoarjo

Mimik

Idayana

menghadiri

acara

Halalbihalal

yang digelar

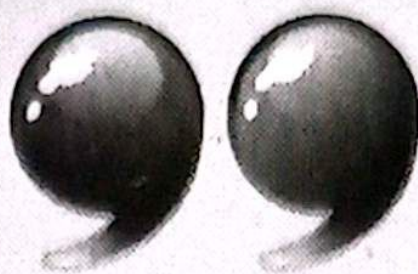
DPC Himpunan

Pengusaha

Muda

Indonesia

(HIPMI)



Tingginya tingkat
pengangguran
di Kabupaten
Sidoarjo merupakan
tantangan yang
harus kita hadapi
bersama. Melalui
kolaborasi, mari
kita berupaya

Sidoarjo di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu (15/4).

Dalam kesempatan itu, ia mendorong sinergi

antara pemerintah dan pengusaha muda untuk memperkuat perekonomian daerah.

Dalam sambutannya, Mimik menyampaikan tema kegiatan Reconnect and Grow: From Silaturahmi to Sinergi sangat relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin diharapkan

Kita berupaya menekan angka pengangguran tersebut,"

Mimik Idayana
Wakil Bupati Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SPPG Prasung...

Selain itu, Mimik memastikan seluruh fasilitas SPPG telah memenuhi

standar operasional dan kesehatan. Mulai ruang pendingin hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dinyatakan layak digunakan.

"Alhamdulillah, semuanya sesuai SOP dan standar kesehatan. Tidak ada kendala," katanya.

Mimik juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta disiplin operasional di dapur SPPG. Seluruh petugas diminta mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.

"Kebersihan harus dijaga. Semua petugas wajib mengikuti standar, karena ini menyangkut kesehatan anak-anak kita," tegasnya.

Ia turut mengajak masyarakat ikut melakukan pengawasan agar layanan

SPPG berjalan optimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala SPPG Desa Prasung Andri Febriansyah menjelaskan, distribusi makanan menjangkau radius hingga enam kilometer dari dapur ke penerima manfaat.

"Penerima manfaat utama adalah anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jangkauan distribusi maksimal sekitar enam kilometer," jelasnya.

Dalam operasionalnya, dapur SPPG melibatkan 50 tenaga kerja yang terdiri dari tiga staf dan 47 relawan. Proses produksi dilakukan secara bertahap demi menjaga kualitas dan ketepatan waktu distribusi.

"Persiapan dimulai pukul 17.00, lalu pengolahan makanan sekitar pukul 00.00, pemorsian pukul 02.00, dan distribusi dimulai pukul 07.00," paparnya.

Andri menambahkan, pasokan bahan baku diperoleh melalui kerja sama dengan KDKMP yang melibatkan pelaku UMKM setempat.

"Bahan baku kami ambil dari koperasi desa dan masyarakat sekitar, sehingga bisa membantu penyerapan produk UMKM," tandasnya. (dik/vga)

Police Goes to Pesantren...

Selain penyampaian materi, para santri juga mendapat pemahaman mengenai aturan dasar berkendara yang aman dan bertanggung jawab. Mereka juga diberikan pelatihan safety riding agar

lebih siap menghadapi potensi risiko di jalan raya.

"Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap para santri dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, baik di lingkungan pesantren maupun di tengah masyarakat luas," pungkaskan AKP Sigit Ekan Sahudi. (sur/vga)



Police Goes to Pesantren, Edukasi Santri Tertib Berlalu Lintas

KOTA-Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo menggelar kegiatan Police Goes to Pesantren di Pondok Pesantren Al Amanah Krian, Kamis (16/4). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda, khususnya para santri.

Wakasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Sigit Ekan Sahudi turun langsung memberikan edukasi kepada para peserta. Menurutnya, kegiatan ini menjadi upaya mendekatkan kepolisian dengan lingkungan pesantren sekaligus menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.

"Melalui kegiatan ini,

diri kepada para santri sekaligus menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara Polri dan pondok pesantren. Dengan hubungan yang baik, pesan-pesan keselamatan berlalu lintas diharapkan lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami berharap terjalin hubungan yang baik antara kepolisian dan para santri, sehingga pesan-pesan keselamatan berlalu lintas dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.



BIAR AMAN: Sejumlah santri mengikuti simulasi pengurusan SIM saat edukasi.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Police Goes to Pesantren,...

Selain penyampaian materi, para santri juga mendapat pemahaman mengenai aturan dasar berkendara yang aman dan bertanggung jawab. Mereka juga diberikan pelatihan safety riding agar

lebih siap menghadapi potensi risiko di jalan raya.

“Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap para santri dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, baik di lingkungan pesantren maupun di tengah masyarakat luas,” pungkas AKP Sigit Ekan Sahudi. (sur/vga)





IBADAH: Calon Jamaah Haji di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo.

45 Lansia Masuk Daftar Calon Jamaah Haji, Kesehatan Diperketat

KOTA-Semangat menunaikan rukun Islam kelima begitu tinggi di kalangan calon jamaah haji (CJH) asal Sidoarjo tahun ini. Namun, di balik itu, ratusan jamaah lanjut usia membutuhkan perhatian khusus, terutama dari sisi kesehatan.

Dari total 2.691 CJH asal Sidoarjo, tercatat 45 jamaah berusia 76 hingga 90 tahun. Bahkan, jamaah tertua bernama Raminten yang kini berusia 90 tahun tetap siap berangkat ke Tanah Suci.

Selain itu, sebanyak 386 jamaah lainnya berada di rentang usia 65 hingga 75 tahun dan masuk kategori pemantauan khusus.

Plt Kepala Kementerian Haji (Kemenhaj) Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan pihaknya memprioritaskan kesiapan kesehatan para jamaah, terutama yang tergolong lansia maupun berisiko tinggi (risti).

"Pemeriksaan kesehatan terus kami pantau, khususnya bagi jamaah lansia, terutama yang

berusia di atas 75 tahun," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/4).

Menurut Eliana, selain kesiapan administrasi, kondisi fisik jamaah menjadi perhatian utama agar seluruh CJH dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pemantauan berkala.

"Pemantauan dilakukan secara berkala hingga mendekati jadwal keberangkatan guna memastikan seluruh jamaah dalam kondisi layak berangkat," jelasnya.

Ia juga mengimbau para jamaah, khususnya lansia, mulai menjaga kondisi tubuh sejak dini. Selain itu, keluarga diminta turut memberikan pendampingan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

"Kami minta jamaah menjaga kondisi fisik agar tetap prima dan kuat menjalani seluruh rangkaian ibadah haji," pungkasnya. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Cari Berita



HOME METROPOLIS POLITIK EKSBIS HUKRIM PERISTIWA ADVERTORIAL PROFILE KULINER GAYA HIDUP

sua Jual Beli Kursi Perangkat Desa di Tulangan, Sakai Ungkap Setor Rp 720 Juta hingga Pengaturan Tempat Duduk

Tingginya Anak Tidak Sekolah dan Buruknya Infrastruktur, Masuk 29 Poin Rekomendasi Dewan di LKPj Bupati Sidoarjo



RepublikaTIM.Com

Jumat, 17 Apr 2026 08:03 WIB



Sidoarjo (republikaTIM.com) - Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/04/2026) siang. Terdapat, sebanyak 29 rekomendasi disampaikan pihak legislatif dalam sidang paripurna itu.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Abdillah Nasih didampingi Liga Wakil Ketua Suyarno, Kayan dan Warih Andono. Acara itu juga dihadiri Bupati Sidoarjo Subandi. Hadir pula para pejabat OPD jajaran di lingkungan Pemkab Sidoarjo dan unsur Forkompinda Sidoarjo.



Sentra, 20 Apr 2026 12:17 WIB

Sidoarjo Raih Penghargaan Kabupaten Terfavorit di Festival Film Pendek Jaga Desa Award 2026

Juru bicara DPRD Sidoarjo, M Rojik mengalakan rekomendasi yang ditujukan kepada eksekutif sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Diantaranya meliputi perbaikan perencanaan pembangunan, perbaikan anggaran, perbaikan peraturan daerah dan perbaikan penyempurnaan kebijakan strategis kepala daerah.

"Beberapa rekomendasi ini, sebagai wujud nyata dan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel serta berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar M

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Rojik disela membacakan 29 poin rekomendasi DPRD Sidoarjo.

Lebih jauh Rojik membeberkan 29 rekomendasi itu menyangkut pelaksanaan program pembangunan di berbagai aspek maupun pelayanan publik. Termasuk, soal urusan pendidikan dan kesehatan menjadi titik penekanan yang harus menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo. Salah satunya, masih lingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang menjadi permasalahan serius dan masih lingginya angka pengangguran di Sidoarjo. DPRD Sidoarjo mendesak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengambil langkah kongkret, terukur dan berkelanjutan dalam menekan angka ATS itu.

"Rekomendasi ini, bisa dilakukan melalui penguatan program penjangkauan, pencegahan putus sekolah serta perluasan akses layanan pendidikan inklusif yang merata hingga ke berbagai desa yang tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo," pinta politisi senior PKB Sidoarjo ini.

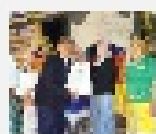
Selain itu, pentingnya diperkuat program beasiswa, termasuk 10.000 beasiswa kuliah, kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha juga harus diperbaiki. Begitu pula soal program afirmasi untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi.



"Memang capaian indeks infrastruktur pendidikan dalam LKPj ditargetkan sebesar Rp 90,67 persen dan terealisasi 96,37 persen. Tapi, semua itu belum mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Karena masih terdapat kerusakan infrastruktur pendidikan yang signifikan di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)," tegas politisi PKB dari Dapil II wilayah Kecamatan Candi, Tanggulangin, Porong dan Kecamatan Jabon ini.



Rojik merinci saat ini, masih terdapat 434 ruang kelas SDN dan 170 ruang kelas SMPN dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat.



Minggu, 19 Apr 2026 22:07 WIB

Harmoni di Kota Delta, Umat Hindu Sidoarjo Rayakan Dharma Shanti di Pura Krebung Momen Pererat Persaudaraan

"Karena itu, DPRD Sidoarjo meminta OPD terkait lebih serius menangani dan memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan itu, sebelum mengalami kerusakan yang lebih parah lagi," paparnya.

Sedangkan pada aspek kesehatan yang menjadi sorotan DPRD Sidoarjo adalah pembangunan dua Puskesmas, yang diminta direalisasi pada 2026. Selain itu, meminta eksekutif lebih serius menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati yang mangkrak dan sempat tertunda. RSUD itu, semestinya selesai dibangun pada 2026. Namun, karena terkendala pelaksanaan di lapangan, sehingga gagal diselesaikan tepat waktu.

"Kami meminta dengan tegas agar RSUD Sedati diselesaikan tahun ini. Dan harus bisa mulai bisa dioperasikan 2027 mendatang. OPD terkait juga harus memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) penunjangnya," jelas Cak Rojik yang juga politisi asal Kecamatan Jabon ini.

Selain itu, dalam forum rapat paripurna itu Rojik juga menyampaikan usulan agar Pemkab Sidoarjo segera membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) dalam menangani kerusakan jalan. Khususnya, jalan aspal yang banyak dikeluhkan masyarakat Sidoarjo selama bertahun-tahun.

"Begitu pula soal kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi sorotan karena dinilai masih kurang sistematis dan belum cukup cekatan dalam merespons kebutuhan publik," paparnya.



Minggu, 19 Apr 2026 19:52 WIB

Kepala Kemenhaj dan Umroh Ajak Ribuan CJH Sidoarjo Tetap Jaga Niat, Kesehatan, Sabar dan Berbekal Takwa

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih berharap seluruh aspirasi, pengaduan serta masukan yang disampaikan DPRD Sidoarjo dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

"Besarnya harapan kami, agar setiap bentuk pengaduan di DPRD Kabupaten Sidoarjo ini, dapat segera tertangani dengan cepat oleh pemerintah daerah Sidoarjo," tandas Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sementara Bupati Sidoarjo, Subandi meminta semua OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo segera menindaklanjuti beberapa rekomendasi legislatif (DPRD) Sidoarjo itu, sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja.

" Termasuk, untuk keberlangsungan berbagai program pembangunan di Sidoarjo ke arah yang lebih baik lagi," pungkasnya. Ary/Waw

Editor : Redaksi



Perkuat dan Kembangkan Ekonomi Kerakyatan, PERBAMIDA Bidik Sinergi Strategis BPR dan Pemda di Rakernas 2026



Republika.com

Jumat, 17 Apr 2026 18:20 WIB



DEPARTEMEN KESEKUTUPAN



DAERAH



PERBAMIDA



PERBAMIDA



PERBAMIDA



Sidoarjo (republika.com) - Aston Hotel Sidoarjo menjadi saksi momentum penting kebangkitan ekonomi daerah. Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah (PERBAMIDA) resmi menggelar Rakernas dan Seminar Nasional 2026, Jumat (17/04/2026).

Dalam Rakernas yang mengangkat tema Kerjasama BPR/BPRS PERBAMIDA dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Mengembangkan UMKM dan Perekonomian, ajang ini menjadi wadah konsolidasi bagi 105 perwakilan BPR dari seluruh penjuru Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke.



REPUBLICATIM
Cepat, Akurat, Tajam, Faktual dan Terpercaya



INFO MEDIA PERS

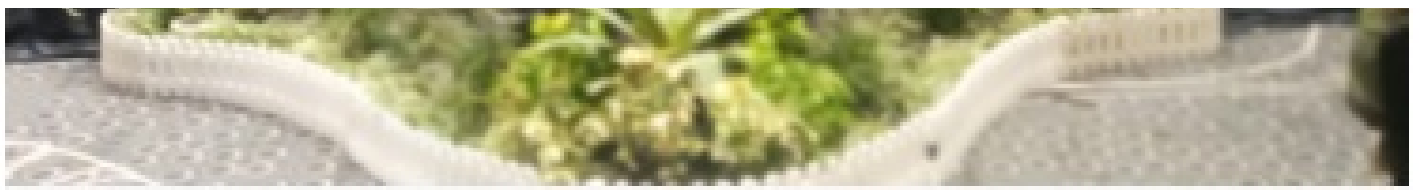
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Ketua Umum PERBAMIDA, Sofia Nurkrisnajati Almaja menekankan BPR memiliki keunggulan komparatif berupa kedekatan emosional dan geografis dengan masyarakat bawah. Bahkan, BPR lebih memahami kebutuhan riil pelaku usaha kecil atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah.

"Karena itu, kolaborasi erat dengan pemerintah daerah adalah kunci kesuksesan dalam pengembangan BPR di setiap daerah," ujar Sofia Nurkrisnajati Almaja disela acara Rakemas di Aston Hotel Sidoarjo.



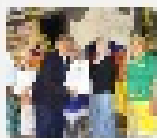


Salah satu poin menarik yang ditekankan Sofia adalah ajakan bagi seluruh anggota PERBAMIDA untuk mereplikasi program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA). Program itu, telah sukses dijalankan BPR Delta Artha Sidoarjo.

"Program ini, menonjolkan bunga yang sangat terjangkau untuk membantu para pelaku UMKM naik kelas, tanpa terbebani biaya modal yang tinggi," pinta Direktur Utama (Dirut) BPR Delta Artha Sidoarjo yang akrab disapa Bu Sofie ini.



"Program ini, menonjolkan bunga yang sangat terjangkau untuk membantu para pelaku UMKM naik kelas, tanpa terbebani biaya modal yang tinggi," pinta Direktur Utama (Dirut) BPR Delta Artha Sidoarjo yang akrab disapa Bu Sofie ini.

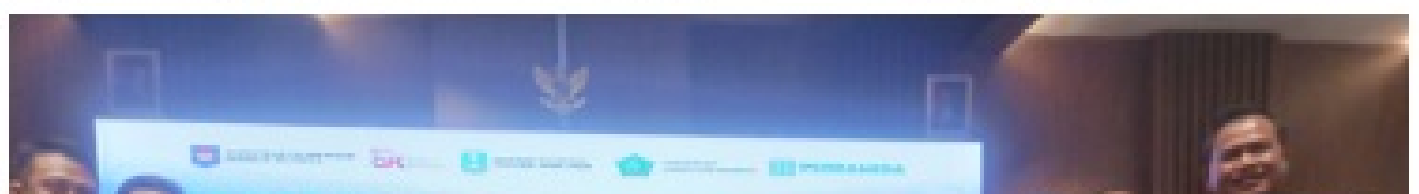


Minggu, 19 Apr 2026 22:07 WIB

Harmoni di Kota Delta, Umat Hindu Sidoarjo Rayakan Dharma Shanti di Pura Krembung Momen Pererat Persaudaraan

Melalui Rakernas 2026 ini, lanjut Sofie PERBAMIDA yang kini memiliki total 210 anggota di seluruh Indonesia, berkomitmen untuk tidak hanya sekadar menjadi lembaga keuangan saja. Akan tetapi, juga menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif di daerah masing-masing.

"Dengan perpaduan antara kebijakan pemerintah daerah yang suportif, pengelolaan BPR yang profesional dan sentuhan teknologi digital, targetnya jelas. Yakni UMKM Indonesia yang lebih tangguh dan ekonomi daerah yang semakin mandiri," ungkap Sofie.





Hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim), Emil Elestianto Dardak. Dia memberikan sorotan tajam pada aspek modernisasi. Menurutnya, BPR tidak boleh lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional di tengah gempuran teknologi keuangan (fintech). Menurutnya, BPR harus selalu punya aksesibilitas. Artinya, BPR harus tetap menjadi garda terdepan bagi sektor informal yang belum terjangkau perbankan umum (unbankable).



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Begitu pula soal digitalisasi. Program digitalisasi bukan hanya sekedar mengganti perangkatnya saja. Akan tetapi mengubah pola pikir (mindset) dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar layanan lebih cepat, efisien dan aman. Program ini relevansinya adalah transformasi digital adalah cara agar BPR tetap relevan bagi generasi pelaku usaha muda di masa depan," tegas Emil Elestianto Dardak.



Sementara Pelaksana Harian (Plh) Sekda Sidoarjo, M Ainur Rohman menyambut hangat para peserta dan berharap forum Rakernas itu, menjadi ajang pertukaran ide yang produktif. Selain membahas isu permodalan dan tata kelola, Sidoarjo juga memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan potensi lokal di Kota Delta.

"Ada beberapa isu strategis yang dibahas. Selain penguatan permodalan yakni strategi suntikan modal dari Pemda untuk memperluas daya jangkauan kredit di BPR juga soal tata kelola. Yakni melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bank milik daerah. Termasuk inovasi produk harus ada penyesuaian layanan perbankan yang sesuai dengan karakter spesifik masyarakat lokal di daerah," papar M Ainur Rohman yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Pemkab Sidoarjo ini. Ary/Waw

Editor : Redaksi

Beranda • Daerah

Daerah

Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo Soroti Pengangguran Hingga RS Sedati Terbengkalai

Sekilas Media 17/04/2026 8:25 WIB 2 Min Baca



Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih dan bupati Sidoarjo H. Subandi saat Rapat Paripurna (foto suaid)

2.6k
DISALKA

Sidoarjo, Sekilasmedia.com—Rapat paripurna yang digelar di Gedung Lantai 2 DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (16/4/2026) menjadi momentum penting dalam menyampaikan berbagai persoalan strategis daerah.

Dalam sidang tersebut, salah satu perwakilan partai menyampaikan orasi yang menyoroti masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo serta kondisi RS Sedati yang dinilai terbengkalai.

Selain itu, dalam forum rapat paripurna juga disampaikan usulan agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) guna menangani kerusakan jalan, khususnya aspal yang banyak dikeluhkan masyarakat.

BACA JUGA: [Si UJOL, Menjawab Tantangan Dunia Pendidikan di Abad ke 21](#)

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi sorotan karena dinilai masih kurang sistematis dan belum cukup cekatan dalam merespons kebutuhan publik.

Rapat paripurna ini sekaligus menjadi ajang penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dari Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih SM, kepada Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH.Mkn.

Hadir Kepala BNNK Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto SH, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dan Plh Sekda kabupaten Sidoarjo M.Ainur Rahman.

Dalam penyampaiannya, Nasih berharap seluruh aspirasi, pengaduan, serta masukan yang telah disampaikan oleh DPRD dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Konteksnya dalam hal ini, DPRD Sidoarjo hadir melindungi warga. Supaya tidak ada lagi penahanan ijazah kelulusan dan merendahkan para tamu yang datang ke sekolah.

"Jangan lagi ada ijazah anak dari warga Sidoarjo yang ditahan sekolah. Selain itu, sekolah juga harus menghormati dan melayani tamu dengan baik. Tidak boleh lagi, sekolah kehilangan tatakrama dan etika kesopanan," pesannya memberikan tekanan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi dan Umum Baznas Sidoarjo, Drs. H. Ilhamuddin mendatangi SMK PGRI 2 Sidoarjo bertujuan melunasi tunggakan seorang siswi yang telah lulus dan ijazahnya ditahan sekolah. Upaya tebus ijazah yang dilakukan Baznas Sidoarjo berhasil. Namun dibalik proses penebusan ijazah itu, Ilhamuddin justru mendapat perlakuan kurang baik dari sekolah.

Ia tidak dipersilahkan masuk ruangan untuk duduk. Malah dibiarkan berdiri di dekat pintu gerbang sekolah. Bahkan petugas keamanan dan seorang guru setempat mengarahkan Ilhamuddin untuk menuju loket antrian pembayaran SPP.

Sikap tak menghormati tamu juga dialami anggota komisi D DPRD Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto, SH, MH. Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu datang ke SMK PGRI 2 Sidoarjo untuk melakukan validasi murid yang ijazahnya ditahan sekolah.

Bukannya diterima dengan baik dan dipersilahkan masuk. Ia hanya ditemui petugas keamanan di depan pintu gerbang sekolah yang tertutup rapat. Saat itu, security menyampaikan kepada Tarkit bahwa kepala sekolah dan empat Wakasek tidak ada di tempat.

Sebagai wakil rakyat, Tarkit menyesalkan standar pelayanan sekolah yang dinilai jauh dari tatakrama dan etika kesopanan. (luk)

Ditag  [Etika Kesopanan](#) [SMK PGRI 2 Sidoarjo](#)

oleh redaksi





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan bagi UMKM di daerah. "Produk yang dihasilkan pelaku usaha perlu memenuhi standar tertentu, baik dari sisi kualitas maupun konsistensi, agar mampu masuk ke pasar yang lebih luas," ujarnya dalam kegiatan tersebut.

Dalam wawancara terpisah, Anggota DPRD Sidoarjo komisi C, Vike Widya Asroni, S.M. menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari pokok pikiran (pokir) yang ia dorong melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Menurutnya, kurasi produk menjadi langkah konkret untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.

"Kurasi ini salah satu pokir saya di Dinas Koperasi ini untuk memberikan peningkatan mutu dan kualitas pada para UMKM, khususnya di Kecamatan Sukodono, agar bisa naik kelas dan dapat diterima masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Camat Sukodono, Ineke Dwi Setiawati, S.STP., M.PA., menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan kurasi tersebut. Ia menilai program ini penting untuk mendorong pelaku UMKM di wilayahnya agar lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas.

"Kegiatan ini menjadi peluang bagi pelaku UMKM di Sukodono untuk meningkatkan kualitas produknya, baik dari sisi rasa, kemasan, maupun standar yang dibutuhkan pasar modern," ujarnya.

Selain itu, hadir pula narasumber dari kalangan praktisi dan konsultan pangan. Perwakilan dari Mirota Surabaya, Haina, memberikan pemaparan terkait standar produk yang dapat diterima di jaringan ritel. Ia menekankan pentingnya kualitas rasa yang konsisten, kemasan yang menarik, serta kelengkapan legalitas produk sebagai syarat utama.

"Produk yang akan masuk ke ritel harus memiliki standar yang jelas, baik dari segi rasa, tampilan, hingga izin edar. Ini menjadi kunci agar bisa bersaing di pasar modern," kata Haina.

"Jika ditemukan kekurangan, tim akan memberikan rekomendasi perbaikan, baik dari sisi formulasi maupun teknik produksi. Tujuannya agar produk bisa lebih diterima konsumen," ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi tahap awal sebelum produk-produk tersebut diarahkan untuk menjalin kerja sama distribusi dengan pihak ritel. Setelah sesi sambutan, agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai persyaratan produk agar dapat disuplai ke jaringan Mirota.

Pemerintah daerah berharap, melalui kurasi ini, pelaku UMKM di Sidoarjo mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperluas akses pasar, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.***



Etika Kesopanan SMK PGRI 2 Sidoarjo Disoal, DPRD Akan Panggil dan Evaluasi

17 April 2026 13:17 WIB

oleh redaksi



Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilllah Nasih akan menggelar pertemuan bahas etika kesopanan SMK PGRI 2 Sidoarjo

Sidoarjo, petisi.co – Pelayanan tamu, jauh dari tatakrama dan etika kesopanan yang diterapkan pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2 Sidoarjo mulai mendapat sorotan banyak pihak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo telah mendapat sejumlah laporan serta keluhan terkait hal itu. Rencananya dalam waktu dekat, DPRD Sidoarjo akan mengagendakan pembahasan masalah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak terkait.

"Kami sudah mendengar laporan dari beberapa orang. Secepatnya akan diagendakan untuk memanggil dan mengumpulkan pihak-pihak terkait agar permasalahan ini tidak terulang di sekolah-sekolah lainnya," beber Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdilllah Nasih, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis petang (16/4/2026).

Cak Nasih, panggilan akrab politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpendapat, pada tahap awal pembahasan, pihaknya akan menggelar rapat terbatas dengan mengundang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, ia juga akan mengundang Komisi D DPRD Sidoarjo serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo.

"Penting untuk kita dengarkan keterangan Pak Ilhamuddin dari Baznas dan Pak Tarkit dari komisi D yang mengalami kejadian langsung di SMK PGRI 2 Sidoarjo. Nanti biar UPTD menyimak dan menyampaikan langkah seperti apa yang sebaiknya dilakukan," tegas Cak Nasih.

Menurutnya tidak tertutup kemungkinan DPRD juga akan memanggil kepala SMK PGRI 2 Sidoarjo untuk menjelaskan standar pelayanan tamu yang diterapkan sekolah. Pemanggilan ini akan dilakukan jika diperlukan setelah DPRD Menggelar pertemuan terbatas.

"Kejadian yang seperti ini, harapannya tidak menjadi fenomena bola salju atau ditiru oleh SMK lainnya hingga jadi menggantung. Karena itu segera secepatnya, akan kami gelar pertemuan awal. Selanjutnya pada rapat berikutnya bisa dibahas penegakan etika bersama perwakilan dari Provinsi," tegas Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.

Cak Nasih menduga kasus seperti ini tidak hanya terjadi di SMK PGRI 2 Sidoarjo saja. Namun bisa saja ada di sekolah lain. Oleh karena itu, ia berkeinginan melakukan evaluasi menyeluruh bagi sekolah lainnya.

"Yang terjadi di SMK PGRI 2 Sidoarjo bisa jadi pintu pembuka kotak pandora. artinya bisa saja ada di sekolah lain. Maka perlu dilakukan evaluasi oleh semua pihak. Jangan terjadi hal semacam itu lagi. Wes nahan ijazah, etika sekolah terhadap tamu juga tidak baik," tandas Cak Nasih.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Besar harapan kami agar setiap bentuk pengaduan dari DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat segera tertangani dengan cepat oleh pemerintah daerah," ujar Nasih.

Melalui rapat paripurna masa sidang ini, DPRD Kabupaten Sidoarjo juga berharap adanya percepatan langkah konkret dari Pemkab dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada, termasuk peningkatan kinerja di tengah tantangan global.

Diharapkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif mampu membawa kemajuan serta kesuksesan bagi Kabupaten Sidoarjo ke depannya." Pungkasnya



LINGKUNGAN

INDEKS BERITA

Banyuwangi

Bali

Opini

Surat Pembaca

Video

Kurasi Produk UMKM Sidoarjo, Dinkop Dorong Standar Rasa hingga Akses Ritel Modern



Ryan Karawang

17 April 2026 | 14:39



[Filesatu.co.id](https://filesatu.co.id), **SIDOARJO** | PEMERINTAH Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggelar kegiatan Kurasi Produk Batch I di Pendopo Kecamatan Sukodono, Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas produk pelaku usaha mikro, khususnya sektor **makanan** dan minuman, agar mampu bersaing dan menembus pasar ritel modern.

Kurasi produk dilakukan oleh tim ahli dengan menilai sejumlah aspek, mulai dari rasa, kualitas bahan, hingga potensi pengembangan produk. Dalam proses tersebut, pelaku UMKM tidak hanya menerima penilaian, tetapi juga mendapatkan masukan teknis secara langsung dari para konsultan.

